BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.[1] Hal tersebut dalam penyelenggaraanya diikat oleh beberapa prinsip, dan di antara prinsip-prinsip yang dipedomani, di antaranya yang paling representatif dengan sifat dasar pendidikan terletak pada poin pertama, yang berbunyi, *"pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."* Pesan kuat yang terkandung dalam prinsip tersebut ialah ingin menegaskan bahwa pendidikan hakikatnya adalah bersifat demokratis, kerakyatan dan bukan privat-monarkis.

Untuk itu, bukan satu hal muluk sebagai warga negara dalam kapasitas untuk meningkatkan taraf atau kualitas, kapasitas, dan kapabilitas diri menjadi lebih baik, berkeinginan memperoleh hak dan kewajiban pendidikan dimaksud. Tidak pandang latar agama maupun kultur, semua sama rata berkesempatan menikmati fasilitas pendidikan yang diselenggaran negara. Karena itu berkaitan dengan konteks prinsip penyelenggaraan, peran

[1] Butir isi UU Sisdiknas Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 poin 3. Dalam Bab II dijelaskan pula bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dalam bidang pendidikan di banyak negara demokrasi[2] begitu akomodatif terhadap kepentingan warga negaranya, dan agaknya hal itu belum cukup dijadikan teladan oleh negara kita.

Jamak dipahami kaitan antara manusia dan pendidikan semisal dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Manusia di mana pun ia berada, -dipastikan- butuh dengan pendidikan. Selain fungsi utama dari pendidikan adalah mengembangkan seluruh potensi manusia ke arah lebih baik atau ke arah yang menjadi cita-cita manusia,[3] pendidikan juga terbukti ampuh sebagai amunisi pengukuh fitrah kemanusiaan.[4] Dalam Islam dengan kapasitas keilmuaan yang diperoleh manusia melalui pendidikan, oleh Allah Swt. diganjar akan diangkat (kedudukannya) beberapa derajat.[5] Janji yang dipromosikan Allah Swt. melalui firma-Nya tersebut tentu bukan hanya sekedar iming-iming di dunia, lebih dari itu yakni di akhirat kelak. Lebih dari itu, siklus pendidikan yang melibatkan manusia yang mempunyai peran

---

[2] Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan-warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dalam pengertian yang partisipatif demokrasi disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Lihat, Frans Magnis Soseno, "*Demokrasi: Tantangan Universal*" dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog Antar Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 125. Artinya kekuasaan sebuah negara itu diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Tercatat hampir 97 persen negara-negara di dunia modern sekarang mengklain menganut sistem Demokrasi ini (Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, dan bekas Eks-Unisoviet). Lihat, Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241.

[3] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 3.

[4] Fitrah merupakan sifat dasar atau potensi-potensi dasar manusia. Oleh karena itu melalui pendidikan sejatinya telah terjadi proses pembinaan dan pengembangan potensi-potensi kemanusiaan tersebut seoptimal mungkin. Lihat Ihya' Ulumuddin, *Humanisme Pendidikan Akhlak; Telaah Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi*, (Surabaya: Al Husna Press, 2012), 46.

[5] QS. Al Mujadalah: 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai subjek dan sekaligus objek pendidikan *(homo educantum)*, -diharapkan- dapat beriring-kelindan saat diselenggarakan dalam sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Artinya, pendidikan yang dilakukan manusia akan dapat berjalan dengan apik nan ideal tatkalah dalam prosesnya juga turut melibatkan semua komponen-komponen pendukung (baca: *stakeholder*).

Selain daripada itu, perlu untuk diingat bahwa pendidikan tatkalah telah melebur dalam arus pemerintahan, negara, dan politik ia bisa bermetamorfosis menjadi magnet, ia rentan jadi ajang komoditas yang berorientasi profit (keuntungan materiil). Tentu kemungkinan terbesarnya berdampak pada tidak meratanya pendidikan untuk dan kepada masyarakat. Karenanya bercermin pada apa yang John Dewey kemukakan bahwa negara yang berazas demokrasi merupakan negara yang dapat menyediakan pemerataan kesempatan pendidikan *(educational equality)* dan pemerataan mutu pendidikan bagi semua warga negaranya secara adil.[6] Dapat dipahami pula pendidikan dan demokrasi merupakan satu paket, dimana oleh Dewey pendidikan diibaratkan sebuah sarana/lahan bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pendidikan, demikian penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dijauhkan dari sebuah negara (yang demokratis).[7]

---

[6] Ahmad Samawi, dkk., *Konsep Demokrasi dalam Pendidikan Menurut Progresivissme John Dewey*, BPPS-UGM, 8 (4A), November 1995, 560.

[7] Arif Rohman, *Membebaskan Pendidikan; Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo: 2012), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Resiprositas pendidikan dan demokrasi oleh Dewey menyibak perhatian terhadap demokrasi yang oleh sebagian dipahami hanya ekses pada domain politik pemerintahan semata. Lebih dari itu, mengesampingkan salah satunya (pendidikan dan demokrasi) sama halnya berjalan dengan menggunakan satu kaki alias pincang. Itulah salah satu sebab impian akan adanya pendidikan bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.[8] Namun, sesuai dengan laju perkembangan zaman saat ini, tidak sedikit dunia pendidikan yang itadak mau mengindahkan tata norma yang telah digariskan dalam pendidikan itu sendiri. Tidak sedikit dunia pendidikan dalam prakteknya kerap diiringin, semisal dengan tindak kekerasan, dan pendidikan justru dijadikan sebagai ladang bisnis.[9] Kondisi demikian seharusnya menjadi evaluasi kinerja bagi pemerintah, terkhusus dalam bidang pendidikan.

Sejatinya negara memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni dalam bentuk merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi praktek pendidikan bagi warganya. Namun, sekali lagi negara justru melakukan politisasi dunia pendidikan dalam rangka melegitimasi dan mempertahankan status-quo. Dinamika pendidikan yang dicerminkan pemerintah yang seharusnya *full presented servicing* kepada masyarakat telah terancuni motif-motif lain, pendidikan dijadikan alat kepentingan kekuasaan.

---

[8] Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad* 21, (Yogyakarta; Safiria Insani Press, 2003), 84.

[9] Durhan, "Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Muhammad Natsir", dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. M. Ridwan Natsir, et al. (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lambat laun melalui pendidikan, negara menciptakan *falsches bewusstsein*, kesadaran palsu yang berdampak pada persoalan krusial, yakni keadilan dan pemerataan pendidikan. Ketidakadilan pendidikan menggejala melalui elitisisme yang mengarah pada lahirnya kasta akademik dalam pendidikan,[10] tidak terkecuali pendidikan Islam pun terkena imbasnya. Maraknya pendidikan yang berbiaya mahal dan penyeragaman atau uniformitas pendidikan jelas telah menciderai prinsip dan nilai demokrasi pendidikan.

Sejenak beromantika, semenjak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh *founding father*, Soekarno bangsa ini berusaha bangkit dari keterpurukan dengan berbenah melakukan terobosan-terobosan di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan.[11] Sejarah mencatat perkembangan demokrasi di Indonesia, dari sisi keberlangsungannya, setidaknya dapat cermati dalam empat era atau periodesasi, yaitu: era awal kemerdekaan yang belangsung kisaran 1945 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer.[12] Dilanjut era orde lama berlangsung dari 1959 sampai 1965 dengan praktek demokrasi terpimpin.[13] Kemudian era orde baru

---

[10] Arif Rohman, *Membebaskan Pendidikan; Refleksi Menuju Penyelenggaraan Demokrasi Pendidikan di Indonesia*, 20.

[11] Langkah stategis pemerintah dalam bidang pendidikan ialah dengan dibentuknya kementerian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan (sekarang Kemendikbud, pen.) lihat, Abdul Rahman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*, (Yogyakarta: Kurnia Alam, 2005), 54.

[12] Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen, pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya, (sebuah prosedur parlemen yang digunakan kepada parlemen oleh parlemen oposisi dengan harapan mengalahkan atau mempermalukan sebuah pemerintahan).

[13] Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlangsung paling lama, 1965 sampai 1998 dengan menerapkan demokrasi pancasila.[14]

Adapun yang paling mutakhir ialah era reformasi, dalam pemanfaatannya berlangsung semenjak tumbangnya era orba 1998 sampai sekarang masih konsis mengikuti sistem demokrasi multi partai[15] sebagai wadah keragaman aspirasi bangsa Indonesia yang multi ras dan etnis. Dan, yang disebut terakhir, era reformasi, paling banyak menorehkan perubahan-perubahan di hampir semua aspek kehidupan, tidak tertinggal pendidikan Islam di negeri ini. Sebagai contoh dengan lahirnya sejumlah tata aturan kebijakan tentang pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan, yakni PP No.

---

kebijakan dan tujuan yang sama. Dengan kata lain, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Lihat, Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, 112.

[14] Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi (kelompok politik terorganisasi yang memberikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah). Lihat, Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 141.

[15] Sigmund Neumann memberikan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Jakarta, 1977), 162.

Dalam demokrasi, partai politik merupakan pilar utama, karena pucuk kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), bahwa *calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik*. Artinya, hak itu secara eksklusif─hanya partai politik yang disebut UUD 1945─diberikan kepada partai politik. Karena itulah, semua demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat dan mapan guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya. Sangat rasional argumentasinya jika upaya penguatan partai politik dibangun oleh kesadaran bahwa partai politik merupakan pilar yang perlu dan bahkan sangat penting untuk pembangunan demokrasi suatu bangsa. Jadi, derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. lihat, Agun Gunandjar Sudarsa, *Sistem Multipartai di Indonesia*, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/83-sistem-multipartai-di-indonesia.html, diakses 18 Nopember 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

55 tahun 2007[16] tentang pendidikan Agama (PA) dan Pendidikan Keagamaan (PK), UU Sisdiknas No. 20. tahun 2003,[17] tercetusnya kurikulum baru tahun 2013 dan lain sebagainya.[18] Dengan mencuatnya kebijakan-kebijakan tersebut dalam konteks saat ini, memberikan pemahaman bahwa dalam setiap pergantian rezim hanya mengalihkan (baca: berpindah) dampak terhadap keberlangsungan demokrasi pendidikan. Artinya, meminjam isitilah Masdar Hilmy bahwa fenomena demikian ini merupakan bagian episode *"rite de passage"* praktik dari demokrasi di Indonesia yang masih patut untuk diperhatikan,[19] bukan sistemnya. Sehingga di sini pendidikan sejatinya adalah korban dari kesalahan sistem tersebut.

Mengkaji demokrasi pendidikan dari perspektif mikro akan mengarahkan kepada pemahaman yang agak berbeda sebagaimana yang digagas oleh beberapa tokoh yang memberikan jabaran bahwa demokrasi pendidikan ialah suatu pandangan yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan tanpa membeda-bedakan, tingkat atau stratanya.[20]

---

[16] http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf diakses 11 Nopember 2013 (20:56 Wib.)

[17] http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf diakses 11 Nopember 2013 (20:56 Wib.)

[18] Choirul Mahfud, "Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Analisa Kebijakan Pendidikan Islam Pasca Orde Baru" (Ringkasan Disertasi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 9.

[19] Istilah "*rite de passage*", oleh Masdar Hilmy dipahami secara normatif, yakni sebagai sebuah politik yang terjadi di negeri ini merupakan bagian dari perjalanan dari satu tahapan ke tahapan lainnya yang memang harus dijalani, walau terkadang dijumpai masalah di sana-sini. Lihat Masdar Hilmy, *Islam Profetik; Substansiasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*, (Yogyakarta: Impulse dan Kanisius, 2008), 27-32.

[20] Pengertian tersebut penulis ramu dari gagasan demokrasi yang diutarakan oleh Zaki Badawi, "Demokrasi adalah penetapan dasar-dasar kebijaksanaan dan persamaan terhadap individu-individu yang tidak membedakan asal, jenis, agama, dan bahasa" dan Vebrianto yang memberikan pendapat tentang hubungan antara demokrasi dan pendidikan, bahwasanya pendidikan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap peserta didik mencapai tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada konteks ini kajian demokrasi pendidikan fokus mengupas isu-isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan kerangka pedoman utuh. Sehingga bisa menunjuk kepada seperangkat tujuan, rencana atau *planing*, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan,[21] tentu yang berimplikai langsung kepada kemaslahatan pendidikan masyarakat, sebagaimana yang dipesankan dalam UU Sisdiknas.[22] Selain itu juga demokrasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, melainkan juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia[23] itu sendiri. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Demokrasi Pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan.

Membincang persolan demokrasi dan pendidikan, dalam penelusuran peneliti, tercatat jejak salah satu tokoh bangsa negeri ini yang membanggakan. Seorang tokoh pendidik yang sekaligus piaya dalam dunia perpolitikan, keorganisasian dan dakwah. Beliau adalah Muhammad Natsir.

---

pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Lihat, Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 324-326.

[21] Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 3.

[22] Bunyi Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1), Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa

[23] Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi, “bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi, kontribusinya begitu besar dalam mencetuskan pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan Islam di Indonesia, yang tidak lain sebagai langkah dalam menyongsong dunia pendidikan Islam yang lebih baik.

Sebagai tokoh pendidikan, tentu saja pandangan-pandangan Muhammad Natsir memberikan warna dominan bangunan pendidikan yang bernas keagamaan (Islam). Gagasan Muhammad Natsir dalam bentuk tulisan dan ceramah telah banyak didomumentasikan, salah satunya dalam Capita Selecta jilid 1 dan 2 yang merupakan manifesto pandangan umumnya tentang ideologi negara (politik) dan pendidikan Islam.

Orientasi ideologi negara dimaksud, kemudian tergambar dalam gagasannya tentang demokrasi. Dalam pemikiran Natsir, sebagai seorang tokoh politik Islam, ia tidak menolak sepenuhnya sistem demokrasi yang datang dari (baca: berasal) barat. Muhammad Natsir justru menawarkan pandangannya dengan konsep Theistik Demokrasi, yakni perkawinan antara teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Muhammad Natsir menolak sistem theokrasi dan sekulerisasi, namun ia sependapat dengan gagasan nasionalisme.[24]

Sementara pandangan Muhammad Natsir mengenai pendidikan mengarah pada konsep pendidikan Islam yang integral, harmonis dan universal. Muhammad Natsir menolak dengan tegas sistem pendikotomian

[24] Pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui ketentuanyang ditetapkan Tuhan. Lihat, M. Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Jakarta: Dewan Dakwah, 2000), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan, terutama pada aspek materi atau kurikulum menjadi pendidikan umum dan agama.[25] Pasalnya pendikotomian dalam pendidikan justru akan sulit menghasilkan ilmu yang sempurna (parsial) bagi anak atau peserta didik. Dan, pretensi untuk membandingkan ilmu antara ilmu agama dan umum justru berdampak tidak baik pada anak didik.

Memahami pandangan Muhammad Natsir mengenai demokrasi dan pendidikan Islam, berarti memahami orisinalitas gagasan pemikir ini mengenai demokrasi pendidikan Islam pada komunitas atau masyarakat Indonesia secara umum. Dan, hal ini juga berpotensi untuk menafsir atau –setidaknya- memberi gambaran lebih utuh mengenai konstruksi ideologi demokrasi pendidikan Islam yang dimaknai oleh Muhammad Natsir.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam paparan latar belakang sebelumnya bahwa Mohammad Natsir sebagai sosok yang multitalen yang juga memiliki corak pandangan tersendiri pada persolan pendidikan, utamanya pendidikan Islam dengan mengutarakan konsep pendidikan Islam yang integral, harmonis dan universalnya. Maka, dalam penelitian ini agar menjawab fokus inti serta tidak memunculkan bias, peneliti bermaksud mengidentifikasi dan membatasi masalah pada beberapa persoalan berikut: Pertama, dalam pendidikan Islam terdapat beragam corak pemikiran yang menyertainya, yang tidak jarang ditengarai bersinggungan antara satu dengan lainnya. Di antaranya ada corak

[25] Durhan, "Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Muhammad Natsir", dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. M. Ridwan Natsir, et al. (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran pendidikan Islam yang cenderung tradisionalis dan juga modern. Tentu hal ini berdampak pada kebijakan Sistem Pendidikan Nasional yang berelaku pada waktu itu. Dari sini kemudian menyisahkan ruang untuk dianalisis terkait kebijakan kurikulum dan langkah arif dalam mengakomodir keragaman pandangan tentang pendidikan Islam.

Kedua, agar penelitian ini tetap fokus, maka peneliti membatasi dengan mengkaji pemikiran Muhammad Natsir tentang demokrasi yang dianalisis dalam pemikiran pendidikan Islam untuk kemudian ditarik sebuah pemahaman terhadap pentingnya peranan demokrasi pendidikan Islam.

Melalui identifikasi dan batasan masalah ini, peneliti berharap dalam penelitian ini akan tetap fokus dan sistematis sehingga tidak melebar atau meluas ke arah pembahasan yang lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang dijabarkan di atas, maka ada beberapa persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana konsep demokrasi pendidikan Islam menurut Muhammad Natsir ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Muhammad Natsir tentang demokrasi pendidikan Islam dengan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)?

Dua pertanyaan di atas menjadi fokus dalam penelitian ini karena keduanya merupakan hal inti dari terma persoalan demokrasi pendidikan Islam. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, maka pertanyaan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi pendidikan Islam menurut Muhammad Natsir serta relevansinya dengan sistem pendidikan nasional akan terjawab.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui bahwa konstruksi konsep demokrasi pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, pandangan hidup pencetusnya (konseptor), dan tujuan dari ide dan gagasan itu sendiri. Dan, pada gilirannya dapat membuktikan koherensi[26] antara demokrasi dan pendidikan Islam yang dapat dijadikan formula untuk mendiagnosa pendidikan yang demokratis sebagai model pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melakukan pemilahan kritis guna mencari sintese[27] dari prinsip-prinsip demokrasi dan pendidikan yang digagas oleh Muhammad Natsir. Kemudian hasil daripada sistese tersebut peneliti mengharap setidaknya menjadi sumbangan pemikiran yang bersifat literer untuk meraih semangat demokrasi dan kebangsaan. Dan, lebih khusus akan memberi dan memperkaya khazanah keilmuan Pendidikan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Tidak sedikit para akademisi atau peneliti yang tertarik mengkaji pemikiran Muhammad Natsir. Kepiawaian Muhammad Natsir yang tidak

---

[26] Koheren: bersifat harmonis/ konsisten/melekat, berhubungan; bersangkut-paut. Koherensi: teori untuk menguji kebenaran, dengan menekankan konsistensi atau keharmonisan antara segala keputusan-keputusan kita; keterkaitan. Lihat, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 350.

[27] Paduan berbagai pengertian atau hal supaya semuanya merupakan kesatuan yang selaras. Lihat, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 717.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya fokus pada satu persoalan (baca: multitalenta), menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemerhati untuk melakukan studi mendalam tentang pemikirannya dari berbagai perspektif dan pendekatan.

Sejauh penelusuran peneliti, studi yang membahas pemikiran Muhammad Natsir antara lain seperti Al Juhra, fokus mengkaji pemikiran Muhammad Natsir dengan kesimpulan; pemikiran pendidikan Islam Muhammad Natsir berlandaskan kepada tiga hal pokok. *Pertama*, landasan normatif yang merujuk pada ajaran Islam. *Kedua*, landasan historis, mencakup pengalaman yang diperoleh Muhammad Natsir selama menuntut ilmu, yakni pendidikan yang tidak membedakan status ekonomi, kasta, dan ras, serta tidak ada dikotomi dalam menuntut ilmu. *Ketiga*, landasan filosofis, dengan menyakini kebenaran mutlak dari Tuhan sebagaimana telah terkandung dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.[28]

Menurut al Juhra, pemikiran Muhammad Natsir tentang pendidikan Islam memiliki relevansi dengan dunia pendidikan Islam di Indonesia sekarang ini, dengan bukti maraknya lembaga pendidikan mulai dasar hingga perguruan tinggi menggunakan kurikulum yang mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, sehingga tidak –terjadi- ada dikotomi ilmu.[29]

---

[28] Lihat, Al Juhra, "Konsep Pendidikan Islam di Indonesia Menurut Muhammad Natsir; Relevansi Pemikiran Muhammad Natsir terhadap Pendidikan Islam di Indonesia secara Integral" (Tesis—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008).

[29] Al Juhra, "Konsep Pendidikan Islam di Indonesia Menurut Muhammad Natsir; Relevansi Pemikiran Muhammad Natsir terhadap Pendidikan Islam di Indonesia secara Integral", (Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain al Juhra, ada Durhan yang juga menelusuri konsep pendidikan Islam Muhammad Natsir. Melalui pendekatan deskriftif-kualitatif yang dianalisis secara kritis, Durhan melakukan kajian tentang pemikiran Muhammad Natsir dalam konteks pendidikan Islam. Studi Durhan difokuskan pada telaah sudut gagasan materi yang menjadi poin penting pendidikan, terkhusus pendidikan Islam. Senada dengan al Juhra, Durhan menjelaskan pendapat dari Muhammad Natsir tentang gagasannya yang tegas menolak praktek pendikotomian ilmu hingga memunculkan istilah ilmu agama dan ilmu umum. Durhan menambahkan, dalam pemikiran pendidikan Muhammad Natsir materi pokok yang harus ditanamkan kepada anak didik adalah materi ilahiyah dan bahasa. Melalui materi ilahiyah (tauhid) anak didik dipersiapkan untuk mengenal Tuhannya (Allah), sementara materi bahasa tidak lain ialah untuk mengembangkan wawasan intelektual anak didik.[30]

Studi yang memiliki topik sama mengkaji Muhammad Natsir dilakukan oleh Thohir Luth. Dalam bukunya berjudul, M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya, pandangan Muhammad Natsir diposisikan sebagai salah seorang pengonsep dakwah Islam[31] yang juga ditegaskan sendiri dalam salah satu karyanya, Fiqh Dakwah.[32] Selain ruang lingkup kajiannya yang hanya berfokus pada domain kiprah dakwah Muhammad Natsir, studi ini tidak

---

[30] Durhan, "Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Muhammad Natsir", (Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

[31] Dikatakannya bahwa dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* menentukan tegak atau robohnya suatu masyarakat. Islam tidak bisa berdiri tegak tanpa jama'ah (masyarakat) dan tidak bisa membangun masyarakat tanpa dakwah maka jadikanlah dakwah itu sebagai kewajiban bagi tiap-tiap umat Islam, dan ini tidak boleh dilupakan. Lihat Thohir Luth, M. Natsir; *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 15.

[32] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara khusus menempatkan pandangan Muhammad Natsir tentang demokrasi pendidikan Islam yang bercorak Indonesia.

M. Dzulfikriddin[33] menerangkan kiprah Muhammad Natsir dalam panggung politik Indonesia, sekaligus mengulas argumentasi Muhammad Natsir tentang beberapa tema terkait posisi Muhammad Natsir yang pernah duduk sebagai politikus dan birokrat. Sebagai politikus, lahirnya partai Masyumi[34] tidak luput dari peran sertanya, hingga pada 1950-an Muhammad Natsir menjadi pemimpin tertinggi partai Islam tersebut. Sebagai birokrat Muhammad Natsir pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan, anggota parlemen, ketua formatur kabinet, dan puncaknya ia menjabat sebagai Perdana Menteri RI periode 1950-1951.

Dalam penjabarannya, M. Dzulfikriddin cenderung menempatkan Muhammad Natsir sebagai patron dalam berpolitik. Dalam simpulannya, Muhammad Natsir berhasil memformulasi konsep demokrasi dan sekaligus mempraktikkannya dalam konstelasi perpolitikan di Indonesia.

F. Landasan Teori

Sebagaimana sebuah penelitian ilmiah, maka landasan (kerangka) teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan

---

[33] M. Dzulkifikriddin, *Muhammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia; Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010).

[34] Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) adalah sebuah partai politik yang berdiri pada 7 Nopember 1945 di Yogyakarta. Partai ini didirikan melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945, dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat Islam dan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diijinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Ricklefs, M.C. *A history of modern Indonesia since c. 1200*, (Stanford: Stanford University Press, 1991), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Dan, landasan teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.[35]

Dalam kerangka untuk menjelaskan tentang apa hakikat demokrasi pendidikan dan bagaimana demokrasi dalam pendidikan Islam, peneliti menggunakan pendekatan teori yang telah dikemukakan John Dewey. Demokrasi pendidikan yang digagas John Dewey merupakan suatu pandangan, sikap dan aktifitas yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak (peserta didik) untuk berpartisipasi dalam menentukan pendidikannya agar ia tumbuh dan berkembang secara optimal dan wajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Peneliti menggunakan istilah untuk teori yang digagas Jhon Dewey ini dengan *the concept of idea of democracy in education.*

Demokrasi pendidikan oleh John Dewey ini memiliki landasan ontologis humanistik-naturalistik, dengan sifatnya yang pluralistik, yakni manusia dianggap sebagai makhluk alamiah yang bersifat otonom tetapi relasional dalam kepentingan-kepentingannya sebagai individu. Sementara landasan epistemologisnya eksperimentalisme-instrumental, yaitu manusia mempunyai instrumen yang dapat digunakan untuk mempelajari dan menguasai dunia secara eksperimental. Instrumen dimaksud adalah pemikiran ilmiah yang dituangkan di dalam metode ilmiah eksperimental. Untuk

[35] Teuku Ibrahim Alfian, *Dari Babat dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan landasan aksiologis dijelaskan John Dewey dalam subjektivisme-instrumental, tidak lain adalah nilai yang dipandang sebagai instrumen dan ditentukan oleh manusia sesuai dengan minat, selera, hasrat, dan keinginan manusia. Bagi Dewey, kriteria penilaian itu bukan didasarkan pada hierarki universal, tradisi, kebiasaan, maupun postulat, melainkan pada relasi-relasi dengan suatu maksud, arti, dan tujuan akhir.

Selain itu, dalam hal ini peneliti juga mengambil pemaknaan Demokrasi Pendidikan yang mafhum diterapkan dalam sistem pemerintahan bangsa ini. Yakni demokrasi pendidikan diartikan sebagai hak setiap warga Negara atas kesempatan yang seluas – luasnya untuk menikmati Pendidikan, yang sesuai dengan bunyi pernyataan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) yaitu:

> "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asai manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."

Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan, sebagaimana termaktub dalam UU Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa "setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan." Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Demokrasi Pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama didalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidikan dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain, dalam konteks demokrasi pendidikan Islam, hal ini sangat erat dengan dinamika (baca: sejarah) demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi secara prinsipil dalam Islam telah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. yang dikenal dengan istilah "*musyawarah*". Secara khusus terma "demokrasi" dalam literatur (baik al-qur'an maupun hadits) memang tidak diketemukan, secara nomenklatur "demokrasi" lahir dari dunia barat atau eropa, dan seiring meluasnya Islam hal ini kemudian teradopsi ke dalam peradaban Islam.

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip-prinsip demokrasi Islam.[36] Dan, selanjutnya menjadi pijar lahirnya bentuk-bentuk demokrasi pendidikan Islam, semisal: 1) Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik, dalam hal; kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, kebebasan dalam berpendapat; 2) Persamaan perlakuan terhadap peserta didik; 3) Penghormatan akan martabat individu.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, mengolah dan menganalisis data, maka langkah-langkah yang perlu dijelaskan terkait dengan hal-hal teknis dalam metode penelitian ini, adalah sebagai berikut:

[36] Prinsip dan kaidah demokrasi Islam, antara lain; ta'aruf (saling mengenal), Syura (musyawarah), Ta'awun (kerja sama), Maslahah (menguntungkan), 'Adalah (keadilan Islam). Lihat, Abd Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 287-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penilitian kepustakaan (*library reseach*). Berpacu pada definitif penelitian kepustakaan sendiri ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[37] Melihat dari segi sifatnya, penelitian ini masuk pada jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok.[38] Oleh karena itu, penelitian ini bercorak historis-faktual,[39] karena meneliti tentang tokoh dan pemikirannya, serta deskriptif-analisis[40] yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis dalam mengungkap pemikiran demokrasi Muhammad Natsir kemudian dianalisis berdasarkan konsep pendidikan Islam secara seksama sehingga dapat menemukan model pemahaman utuh dari pemikir yang dikaji.

2. **Sumber Data**

   a. **Sumber Primer**

   Penulis mengkaji pemikiran Muhammad Natsir tentang pendidikan dan demokrasi yang terdapat pada beberapa karya ilmiahnya baik berupa artikel maupun buku, antara lain :

---

[37] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke- 3, 3.

[38] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

[39] Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat,* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), 136.

[40] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) M. Natsir, *Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme, dan Nostalgia*, Jakarta: Media Dakwah, 1987
2) M. Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, Bandung: Trigenda Karya, 1957
3) M. Natsir. *"Politik Melalui Jalur Dakwah"* dalam Memoar Senarai Kiprah Sejarah, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993
4) M.. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam,* Jakarta: Media Dakwah, 2001
5) M. Natsir, *Capita* Selecta *I*, Jakarta: Pustaka Pendis, 1958
6) M. Natsir, Capita *Selecta II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
7) M. Natsir, *Demokrasi di Bawah Hukum,* Jakarta: Media Dakwah 1987
8) M. Natsir, *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, Yogyakarta: Panji Masyarakat, 1981
9) M. Natsir, *Islam Sebagai Ideologi*, Jakarta: Pustaka Aida, 1951

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder diambil dari karya tulis berupa buku maupun artikel yang secara khusus mengkaji Pemikiran Muhammad Natsir, antara lain:

1) Thohir Luth, *M. Natsir; Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) M. Dzulkifikriddin, *Muhammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia; Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010
3) Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008
4) Bachtiar Chamsyah, dkk., *100 Tahun Mohammad Natsir; Berdamai dengan Sejarah*, Jakarta: Republika, 2008
5) Durhan, "Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Muhammad Natsir", (Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
6) Al Juhra, "Konsep Pendidikan Islam di Indonesia Menurut Muhammad Natsir; Relevansi Pemikiran Muhammad Natsir terhadap Pendidikan Islam di Indonesia secara Integral", (Tesis--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008
7) Lukman Hakim (ed.), *M. Natsir di Panggung Sejarah*, Jakarta: Republika, 2008

Selain data primer dan sekunder yang penulis paparkan di atas, tidak menutup kemungkinan penulis juga menggunakan sumber tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variable penelitian yang berupa catatan, transkip, buku, surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kabar, majalah, notulen, prasasti, rapat, leger, dan sebagainya.[41] Metode ini dipandang relevan untuk memperoleh data yang bersumber dari buku sebagai sumber utamanya karena mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan.

Oleh karena itu langkah yang ditempuh peneliti sebagai upaya menyelaraskan metode dokumenter tersebut, maka langkah yang ditempuh antara lain: *Reading*, yaitu dengan membaca dan mepelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian. *Writing*, yaitu membuat catatan data yang berkenaan dengan penelitian. *Editing*, yaitu memeriksa validitas data secara cermat mulai dari kelengkapan referensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

Untuk keseluruhan data yang diperlukan agar tekumpul, maka tindakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan maksud mengorganisasikan data[42] yang kemudian melangkah pada proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yanag tersedia dalam berbagai sumber.[43]

4. Teknik Analisis Data

Adapun tehnik analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan instrument analisis deduktif dan *content analysis* atau analisa isi. Dengan menggunakan analisis deduktif, langkah yang penulis gunakan dalam

[41] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

[42] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), Cet. Ke- 7, 103.

[43] Ibid., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini ialah dengan cara menguraikan beberapa data yang bersifat umum yang kemudian ditarik ke ranah khusus atau kesimpulan yang pasti.[44] Sedangkan *content analysis* penulis pergunakan sebagai pengolahan data untuk pemilahan pembahasan dari beberapa gagasan yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik. Selanjutnya dikelompokan/pengkategorian dengan data yang sejenis, dan dianalisa secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya penulis pergunakan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.[45]

Maksud penulis dalam penggunanaan teknik *content analysis* ialah untuk mempertajam maksud dan inti data-data, sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus utama konsep pemikiran Muhammad Natsir terhadap demokrasi pendidikan Islam, analisis ini penting untuk dijadikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak jauh melebar dari fokus inti pembahasan.[46]

Sebagai gambaran sistematis langkah teknik analisis data dimaksud, yakni:

a) Melakukan pengumpulan data sebagai sumber utama penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan Muhammad Natsir, baik berupa buku, surat kabar, naskah atau manuscript.

---

[44] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. Ke- 10, 18.

[45] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.

[46] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mengkategorikan dan mengkaji secara mendalam temuan dari sumber data yang telah terkumpul.

c) Mendialogkan temuan-temuan data yang terkumpul dalam upaya menemukan titik relevansi pemikiran Muhammad Natsir ke dalam konteks realitas sosial.

d) Melakukan penyimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini selaras dengan fokus bidang kajian, maka dibutuhkan sistematika pembahasan. Adapun rancangan sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitian ini antara lain :

Bab I : Berisi pendahuluan**.** Dalam bab ini penulis mendeskripsikan secara umum dan menyeluruh tentang penelitian ini, yang diawali dari Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian yang mencakup Jenis penelitian; Pendekatan Penelitian, Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data, dan terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II : Dalam bab ini membahas sketsa biografi dan geneologi pemikiran Muhammad Natsir. Meliputi riwayat hidup Muhammad Natsir, riwayat pendidikan Muhammad Natsir, karya-karya intelektual Muhammad Natsir serta perjuangan Muhammad Natsir untuk umat dan bangsa Indonesia.

Bab III : Mengemukakan landasan konsep pemikiran Muhammad Natsir tentang demokrasi pendidikan Islam, baik dari segi normatif maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

filosofis. Sehingga dengan ini diharapkan dapat meneropong pemikiran Muhammad Natsir secara menyeluruh.

Bab IV : Laporan Penelitian. Merupakan inti dari penelitian ini, yakni analisis dari pemikiran Muhammad Natsir tentang demokrasi pendidikan Islam, yang meliputi konsep demokrasi dan pendidikan Islam yang termaktup dalam pemikiran Muhammad Natsir

Bab V : Penutup. Menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diteruskan Daftar Kepustakaan dan Lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id